

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional di Indonesia merupakan hal yang harus terus menerus dikembangkan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek, sebagai bangsa yang mandiri pemerintah berusaha untuk mencari sumber dana dalam membiayai pembangunan dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, baik dari migas maupun nonmigas. Sumber dana yang mampu menopang masyarakat saat ini adalah sumber dana non migas karena untuk sumber dana migas dari tahun ke tahun telah mengalami penyusutan. Salah satu sumber dana non migas yang menjadi sumber utama pendapatan negara adalah pajak. Dalam kurun waktu empat tahun sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, pendapatan negara yang berasal dari pajak terus meningkat secara signifikan. Adapun penerimaan dari pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**  
**Penerimaan Pajak**  
**(Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Negara yang Berasal Dari Pajak</b>
2014	1.280.389
2015	1.379.992
2016	1.546.665
2017	1.498.871

Sumber: [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 pendapatan negara yang berasal dari pajak sebesar Rp 1.280.389 Milyar, pada tahun 2015 sebesar Rp 1.379.992 Milyar, pada tahun 2016 sebesar Rp 1.546.665 Milyar , dan pada tahun 2017 sebesar Rp 1.498.871 Milyar . Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2).

Pengertian tersebut menegaskan bahwa status orang / penduduk bukanlah hal terpenting dalam PBB, karena apapun status seseorang / penduduk ia harus tetap membayar PBB jika ia memiliki bumi / tanah dan atau bangunan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat diperlukan, menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh I Nyoman Normal (2003)

disimpulkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB, jadi faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi pembayaran pajak salah satunya adalah pendapatan / upah wajib pajak.

Besar kecilnya Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri, dalam hal ini tanah dan bangunan. Sesuai dengan hukum permintaan yang berbanding lurus, maka besar kecilnya NJOP dipengaruhi oleh permintaan, dan permintaan akan tanah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak permintaan akan tanah, karena luas tanah di bumi bersifat tetap maka permintaan ini dapat menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan PBB.

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu meningkat, salah satunya adalah jumlah penduduk di daerah Istimewa Yogyakarta dimana dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang signifikan baik penduduk asli daerah tersebut maupun pendatang yang memutuskan untuk tinggal di Yogyakarta. Berikut ditampilkan tabel tentang kenaikan jumlah penduduk di Yogyakarta selama tahun 2012-2016.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Yogyakarta**

Tahun	Jumlah Penduduk
2012	3.552.462 jiwa
2013	3.594.854 jiwa
2014	3.637.116 jiwa
2015	3.679.176 jiwa
2016	3.720.912 jiwa

*Sumber: <http://www.yogyakarta.bps.go.id>*

Berdasarkan tabel jumlah penduduk diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah penduduk di DIY Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Selain itu besarnya UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami peningkatan. Maka berdasarkan landasan teori diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH UPAH MINIMUM KABUPATEN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2014-2017”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Pokok permasalahan yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah besarnya Upah Minimum Kabupaten mempengaruhi penerimaan PBB Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta?
2. Apakah besarnya jumlah penduduk mempengaruhi penerimaan terhadap PBB Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta?
3. Apakah besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Jumlah Penduduk mempengaruhi penerimaan PBB Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta?

### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak pihak tertentu diantaranya:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan dalam perencanaan penerimaan PBB, penetapan UMK, dan program kependudukan.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta informasi yang lebih mendalam mengenai penerimaan PBB bagi dunia akademik.

3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata satu sekaligus untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai PBB serta sebagai sarana pembelajaran dalam praktek penelitian.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh upah minimum kabupaten terhadap jumlah pendapatan atas pajak bumi bangunan Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta.
2. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk daerah terhadap jumlah pendapatan atas pajak bumi bangunan Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta.
3. Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk dan UMK terhadap penerimaan PBB Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta.

#### **E. BATASAN MASALAH**

Agar penelitian ini tidak meluas kedepannya, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Yogyakarta pada tahun 2014-2017.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Upah Minimum Kabupaten dan Jumlah penduduk.
3. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan PBB.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memberikan gambaran singkat yang tujuannya untuk menggambarkan pembaca kepada hal-hal yang diuraikan pada bab berikutnya. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan teori-teori yang mendukung penelitian yaitu menguraikan tentang kajian pustaka, baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menguraikan tentang lokasi penelitian, populasi, sampel penelitian, jenis penelitian, variable penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang menguraikan tentang hasil penelitian atau pengujian data dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penulid yang di dapat dari penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.